



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



RENCANA KERJA RENJA 2023

 Gedung Gabungan Dinas Lt. 5, Jl. Rambutan

 diskominfo.kaltaraprov.go.id

 DKISP Kaltara



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



RENCANA KERJA RENJA 2023

 Gedung Gabungan Dinas Lt. 5, Jl. Rambutan

 diskominfo.kaltaraprov.go.id

 DKISP Kaltara



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 telah selesai disusun sebagaimana didasarkan pada Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.

Tanjung Selor, Juli 2022
Kepala Dinas,

ILHAM ZAIN, S.SOS., M.PA
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19670407 199803 1 007



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 8 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 8 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 35 |
| 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 40 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 47 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 67 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 69 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi | 69 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 77 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 80 |
| BAB V PENUTUP | 87 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian s/d Tahun 2021 | 25 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 36 |
| Tabel 2.3 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara | 48 |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara | 67 |
| Tabel 3.1 | Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Nasional | 71 |
| Tabel 3.2 | Indikasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 yang mendukung Sepuluh Prioritas Daerah | 76 |
| Tabel 3.3 | Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 | 79 |
| Tabel 4.1 | Rumusan Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 | 82 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (*common goals*) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Pada pasal 13 ayat (2) dijelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 16 dijelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan melalui tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023, mengacu kepada Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
27. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun**;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,



- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39);
 33. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 6);
 34. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 38);
 35. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 29).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik serta urusan Persandian selama 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.



Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023, sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara (Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Bidang Statistik dan Urusan Bidang Persandian) hingga tahun 2023;
- 2) Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara kedalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2022 dan prakiraan tahun 2023;
- 3) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023;
- 4) Menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023;
- 5) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.



- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
Bab ini berisi penjelasan mengenai rencana kerja / langkah - langkah yang dilakukan Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber – sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- BAB V PENUTUP**
Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara tahun lalu (tahun 2021), rata-rata tingkat capaian kinerja secara fisik dari seluruh program / kegiatan / sub kegiatan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebesar 98,86 % dengan rata-rata tingkat realisasi anggaran kegiatan di seluruh program / kegiatan / sub kegiatan sebesar 89,76 % dan untuk perkiraan Realisasi capaian program / kegiatan / sub kegiatan tahun 2022 mengacu pada target capaian kinerja APBD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian pada tahun berjalan (2022). Rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara tahun lalu dijabarkan sebagai berikut :

A. Realisasi program / kegiatan / sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebesar 284 Unit, realisasi capaian kinerja sebesar 225 Unit dengan persentase tingkat capaian kinerja 79,23 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.221.770.090,- dengan persentase 85,67 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.593.300.686,- .
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebesar 125 Buah, realisasi capaian kinerja sebesar 107 Buah dengan



persentase tingkat capaian kinerja 85,60 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.837.000,- dengan persentase 81,53 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 59.903.421,-. Capaian target kinerja hasil/keluaran terhadap sub kegiatan ini pada dasarnya mencapai 100 %, rencana kegiatan telah terealisasi sesuai jumlah unit/buah yang ada pada DPA, namun pada saat penyusunan / penginputan perubahan data target kinerja hasil/keluaran pada Renja Perubahan Tahun 2021 terdapat kekeliruan dalam penyesuaian perhitungan target yang akan dicapai.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebesar 2.190 eksemplar, realisasi capaian kinerja sebesar 750 eksemplar dengan persentase tingkat capaian kinerja 34,25 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.150.000,- dengan persentase 30 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- .

- b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebesar 27 Unit, realisasi capaian kinerja sebesar 6 Unit dengan persentase tingkat capaian kinerja 22,22 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.483.291,- dengan persentase 30,13 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 61.335.000,-.

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi :



- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebesar 32 OPD, realisasi capaian kinerja sebesar 22 OPD dengan persentase tingkat capaian kinerja 75,00 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.167.930.440,- dengan persentase 94,84 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.285.999.996,-.

- B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dari target realisasi yang direncanakan sebanyak 2 Dokumen, realisasi capaian kinerja juga tersusun sebanyak 2 Dokumen dengan persentase tingkat capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 133.912.596,- dengan persentase 85,63 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 156.382.000,-. Hal ini terjadi dikarenakan pada 2 Triwulan awal, kegiatan / pertemuan yang berkaitan dengan perencanaan dengan pusat maupun di daerah dilakukan secara tatap muka / lebih banyak dilakukan secara *daring* sehingga menyebabkan sisa anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas;

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dari target realisasi yang direncanakan sebanyak 1 Dokumen, realisasi capaian kinerja tersusun 1 Dokumen dengan



persentase tingkat capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dengan persentase 66,67 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-. Hal Ini terjadi dikarenakan pada belanja Jasa Tenaga Operator Komputer hanya dibayarkan selama 8 bulan menyesuaikan dengan pelaksanaan pekerjaan penyusunan Dokumen RKA SKPD.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu sebanyak 1 Dokumen, dengan persentase tingkat capaian kinerja 100%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu sebanyak 1 Dokumen, dengan persentase tingkat capaian kinerja 100%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu sebanyak 1 Dokumen, dengan persentase tingkat capaian kinerja 100%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu 100 % sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.090.000,- atau 89,92 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 26.790.000,-.



- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu sebanyak 2 Dokumen, dengan persentase tingkat capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.022.000,- dengan persentase 38,66 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 88.010.000,- . Hal Ini terjadi dikarenakan tidak dapat terbayarnya belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim SAKIP dan RB) sebagai akibat dari tidak terakomodirnya redaksi Pembiayaan Tim SAKIP dan TIM RB Perangkat Daerah pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 12 Bulan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.807.732.724,- dengan persentase 85,67 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.611.814.768,-. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat perubahan komposisi dan jumlah ASN (mutasi) sehingga pelaksanaan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN menyesuaikan dengan jumlah yang ada pada Tahun 2021.

- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 12 Bulan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.246.964.919,- dengan persentase 99,46 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.253.777.275,-.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Realisasi Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD telah memenuhi target



kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 12 Bulan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 151.400.000,- dengan persentase 90.83 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 166.680.000,-. Hal Ini terjadi dikarenakan pembayaran menyesuaikan dengan pelaksanaan pekerjaan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan menyesuaikan dengan ketentuan standar harga satuan yang berlaku.

- Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 12 Bulan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 204.330.000,- dengan persentase 65,69 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 311.050.000,-. Hal Ini terjadi dikarenakan pembayaran menyesuaikan dengan ketentuan standar harga satuan yang berlaku.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Realisasi Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 12 Bulan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.950.000,- dengan persentase 97,41 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 63.600.000,-.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 71 Orang dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar



Rp. 427.965.500,- dengan persentase 94,06 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 454.998.100,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 12 Bulan pelaksanaan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.500.000,- dengan persentase 64,29 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- . Hal Ini terjadi dikarenakan pembayaran menyesuaikan dengan pelaksanaan pekerjaan.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 12 Bulan pelaksanaan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 525.043.718,- dengan persentase mencapai 99,09 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 529.872.230,-.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 12 Bulan pelaksanaan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 541.947.560,- dengan persentase mencapai 89,45 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 605.896.254,-.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 7 Unit Kendaraan Roda Dua dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 232.619.415,- dengan persentase mencapai 92,31 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 252.000.000,-.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni selama 6 Bulan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 799.000.000,- dengan persentase mencapai 69,78 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.145.000.000,-.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni selama 12 Bulan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 976.872.674,- dengan persentase mencapai 91,18 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.071.386.000,-.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan

Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni 17 Unit dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 176.786.479,- dengan persentase mencapai 45,36 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 389.781.000,-.



- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni 2 Unit dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.254.950,- dengan persentase mencapai 79,44 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 90.950.000,-.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni 10 Video dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 178.750.000,- dengan persentase mencapai 89,38 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 1 Paket dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.465.000,- dengan persentase mencapai 44,05 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 37.375.000,-.

- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Realisasi Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 12 Bulan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.792.000,- dengan persentase mencapai 97,84 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 35.560.000,-.



- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Realisasi Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 12 Bulan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 127.530.728,- dengan persentase mencapai 51,51 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 247.569.090,-

- Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
Realisasi Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 12 Bulan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 711.786.664,- dengan persentase mencapai 92,01 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 773.555.672,-

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 12 Bulan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.951.472.382,- dengan persentase mencapai 97,08 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.250.611.538,-

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
Realisasi Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebesar 42 OPD, realisasi capaian kinerja sebesar 42 OPD dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi



anggaran sebesar Rp. 23.023.600,- dengan persentase 88,55 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 26.000.000,-

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 5 Aplikasi dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.898.366,- dengan persentase mencapai 98,96 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 78.720.000,-

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas Kota Cerdas

Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas Kota Cerdas telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 2 Kegiatan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 551.487.034,- dengan persentase mencapai 88,42 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 623.734.000,-

- Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 1 Kegiatan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 106.031.842,- dengan persentase mencapai 96,91 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 109.408.616,-

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik



Sektoral telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 1 Paket dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 165.607.015,- dengan persentase mencapai 92,31 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 179.412.220,-

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 1 Paket dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dengan persentase mencapai 47,62 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.400.000,-

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Realisasi Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 3 Kegiatan dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.250.497,- dengan persentase mencapai 85,86 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 194.805.288,-

b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Realisasi Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni sebanyak 5 OPD dengan persentase tingkat capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran



sebesar Rp. 132.988.000,- dengan persentase mencapai 84,75 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 156.921.488,-.

C. Realisasi program / kegiatan / sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Realisasi kegiatan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 21 Orang, realisasi capaian kinerja sebanyak 22 Orang dengan persentase tingkat capaian kinerja 104,76 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 76.993.237,- dengan persentase sebesar 66,83 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 115.208.000,- melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 1 orang karena menyesuaikan kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Realisasi kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu 3000 lembar materai dan 15 kg paket pengiriman, realisasi capaian kinerja sebanyak 4500 lembar atau (150 %) dan 0 Kg atau (0 %) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- atau 96,77 % dari pagu anggaran Rp. 46.500.000,-. Kelebihan realisasi dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dikarenakan tidak adanya paket yang dikirim menggunakan jasa pengiriman dan tingginya kebutuhan terhadap penggunaan materai sehingga



penyerapannya menyesuaikan kebutuhan untuk belanja materi dalam mendukung pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi kegiatan Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 40 Aplikasi, realisasi capaian kinerja sebanyak 43 Aplikasi dengan persentase tingkat capaian kinerja 107,50 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 123.193.660,- dengan persentase sebesar 88,94 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 138.517.380,-. Hal ini terjadi karena Jumlah Hosting Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang mendaftar pada Data Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara melebihi perkiraan dari yang ditargetkan.

b. Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebesar 32 OPD, realisasi capaian kinerja sebesar 34 OPD dengan persentase tingkat capaian kinerja 106,25 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.950.000,- dengan persentase 83,61 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 176.950.000,-. Hal ini terjadi karena Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan infrastruktur Pusat Data



Pemerintah Daerah pada Data Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara melebihi perkiraan dari yang ditargetkan.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Realisasi kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari target sebanyak 40 kegiatan, terealisasi sebanyak 80 kegiatan dengan persentase tingkat capaian kinerja 200 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.340.000,- dengan persentase sebesar 80,32 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 44.000.000,- . Hal ini terjadi karena pada Tahun 2021 masih diberlakukan pembatasan terhadap kegiatan / rapat pertemuan secara tatap muka, menyebabkan meningkatnya intensitas kegiatan / rapat pertemuan yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara *daring* melalui *Zoom Meeting* yang layanannya disediakan oleh 2 akun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara masing - masing dengan kuota 200 peserta dan 500 peserta rapat *daring*.

3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Keamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Realisasi kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari target sebanyak 4 Sistem Elektronik, terealisasi sebanyak 5 Sistem Elektronik dengan persentase tingkat capaian kinerja 125 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 117.790.000,- dengan persentase sebesar 94,42 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 124.750.000,- .



D. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau Terlampauinya target kinerja program / kegiatan / sub kegiatan ;

1) Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

- Adanya perubahan komposisi pejabat struktural menyebabkan perubahan komposisi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga membutuhkan waktu penyesuaian dalam melakukan pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran ;
- Adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah berupa pembatasan perjalanan dinas yang harus dilaksanakan secara selektif dan pembatasan kegiatan pertemuan tatap muka untuk pencegahan resiko penularan / penyebaran virus COVID-19 sehingga beberapa kegiatan misalnya seperti sewa ruang pertemuan, Akomodasi dan Transport Narasumber tidak terealisasi.
- Waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat setelah Penetapan DPA Perubahan 2021 yaitu pada akhir Bulan Oktober.

2) Faktor - faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan

- Terdapat beberapa data target capaian kinerja program / kegiatan / sub kegiatan yang tidak disesuaikan dengan penambahan pagu anggaran dari eks. Biro Humas. ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, sehingga menyebabkan saat pengukuran capaian kinerja menghasilkan angka yang melebihi target capaian kinerja;
- Pada Tahun 2021 masih diberlakukan pembatasan terhadap kegiatan / rapat pertemuan secara tatap muka, Intensitas kegiatan / rapat pertemuan yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara *daring* melalui *Zoom Meeting* meningkat, hal ini menyebabkan Capaian kinerja salah satu layanan yaitu fasilitasi Zoom Meeting begitu tinggi

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah akibat tidak tercapainya target kinerja program /



kegiatan adalah rendahnya capaian kinerja program / kegiatan / sub kegiatan terhadap Target Renstra Perangkat Daerah;

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah akibat realisasi capaian kinerja melebihi target kinerja program/kegiatan adalah tingginya capaian kinerja program / kegiatan / sub kegiatan terhadap Target Renstra Perangkat Daerah;

F. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- Merencanakan target serta memaksimalkan pelaksanaan Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Semester I, untuk mempercepat penyerapan APBD dan menghindari keterlambatan administrasi kegiatan;
- Memaksimalkan monitoring dan evaluasi rencana kerja serta target bulanan / triwulanan yang telah direncanakan;
- Merencanakan indikator dan target kinerja program / kegiatan / sub kegiatan sesuai dengan penganggaran;



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian s/d Tahun 2022

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 - 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|--|--|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2021 | Realisasi Renja PD Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | |
| 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI ASN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI | 100 % | | | | | 100 | 100 | 100 |
| 2.16.01.1.01 | - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 55 Dokumen | | | | | | | |
| 2.16.01.1.01.01 | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun | 5 Dokumen | | | | | 1 | 1 | 20 |
| 2.16.01.1.01.02 | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun | 5 Dokumen | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.01.03 | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun | 5 Dokumen | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.01.04 | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun | 5 Dokumen | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.01.05 | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun | 5 Dokumen | | | | | 0 | 0 | 0 |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 - 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---------------------|---|---|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2021 | Realisasi Renja PD Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.16.01.1.01.06 | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun | 20 Laporan | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.01.07 | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun | 10 Laporan | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.02 | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 60 bulan | | | | | | | |
| 2.16.01.1.02.01 | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN | 60 bulan | | | | | 12 | 3 | 5 |
| 2.16.01.1.02.02 | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 bulan | | | | | 12 | 3 | 5 |
| 2.16.01.1.02.03 | - Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah layanan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 60 bulan | | | | | 12 | 3 | 5 |
| 2.16.01.1.02.05 | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya | 5 laporan | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.02.07 | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya | 90 laporan | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.02.08 | - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 60 laporan | | | | | 12 | 3 | 5 |
| 2.16.01.1.03 | - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 60 bulan | | | | | | | |
| 2.16.01.1.03.05 | - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi/disusun | 5 laporan | | | | | 1 | 0 | 0 |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 - 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---------------------|--|---|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2021 | Realisasi Renja PD Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.16.01.1.03.06 | - Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah layanan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 60 bulan | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.05 | - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 60 bulan | | | | | | | |
| 2.16.01.1.05.02 | - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan | 130 setel/buah | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.05.04 | - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dimutakhirkan | 60 sistem | | | | | 12 | 3 | 5 |
| 2.16.01.1.05.09 | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 150 orang | | | | | 30 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.06 | - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 60 bulan | | | | | | | |
| 2.16.01.1.06.02 | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 57 buah/unit | | | | | 15 | 2 | 3,51 |
| 2.16.01.1.06.03 | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 125 buah/unit | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.06.04 | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60 bulan | | | | | 12 | 3 | 5 |
| 2.16.01.1.06.05 | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 60 bulan | | | | | 12 | 3 | 5 |
| 2.16.01.1.06.06 | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 7300 eksemplar | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.06.09 | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 bulan | | | | | 0 | 0 | 0 |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 - 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|---|---|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2021 | Realisasi Renja PD Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.16.01.1.07 | - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD yang diadakan | 10 unit | | | | | | | |
| 2.16.01.1.07.05 | - Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan | 10 unit | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.08 | - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | 60 bulan | | | | | | | |
| 2.16.01.1.08.01 | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan | 60 bulan | | | | | 12 | 3 | 5 |
| 2.16.01.1.08.03 | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 12 bulan | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.08.04 | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 60 bulan | | | | | 12 | 3 | 5 |
| 2.16.01.1.09 | - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya | 235 Unit | | | | | | | |
| 2.16.01.1.09.01 | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya | 97 unit | | | | | 16 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.09.02 | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa yang disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya | 15 unit | | | | | 2 | 0 | 0 |
| 2.16.01.1.09.06 | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaannya | 75 unit | | | | | 0 | 0 | 0 |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 - 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|---|--|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2021 | Realisasi Renja PD Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.16.01.1.09.07 | - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dilakukan pemeliharaan | 48 unit | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBNIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | 80 % | | | | | 60 | 60 | 75 |
| 2.16.02.1.01 | - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi | 85 Media | | | | | | | |
| 2.16.02.1.01.02 | - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah laporan hasil monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), survei, jajak pendapat dan pengelolaan aduan masyarakat | 4 Laporan | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.02.1.01.04 | - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Konten dan media komunikasi publik yang di kelola | 48 Konten | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.02.1.01.06 | - Pelayanan Informasi Publik | Jumlah perangkat daerah yang melakukan pemutakhiran informasi publik | 205 PD | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.02.1.01.07 | - Layanan Hubungan Media | Jumlah media publikasi | 20 Media | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.02.1.01.10 | - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Sosialisasi / Bimtek Keterbukaan Informasi Publik | 5 Kegiatan | | | | | 1 | 0 | 0 |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 - 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|---|--|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2021 | Realisasi Renja PD Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.16.02.1.01.11 | - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Penyediaan operasional Komisi Informasi dan penyelesaian sengketa informasi di Prov. Kalimantan Utara | 60 Bulan | | | | | 12 | 3 | 5 |
| 2.16.02.1.01.12 | - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Kerjasama dengan Media dan kemitraan komunitas nasional dan daerah | 47 Kelompok | | | | | 7 | 0 | 0 |
| 2.16.02.1.01.13 | - Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi yang tersedia | 12 Unit | | | | | 1 | 0 | 0 |
| 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 1. PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO | 95,12 % | | | | | 78,04 | 78,04 | 82.04 |
| | | 2. PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI | 95 % | | | | | 70.00 | 70.00 | 73.68 |
| 2.16.03.1.01 | - Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Indeks nilai domain Tata Kelola SPBE | 3.5 <i>Nilai Indeks</i> | | | | | | | |
| 2.16.03.1.01.01 | - Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | Jumlah perangkat daerah memiliki portal dan situs web yang terdaftar | 42 OPD | | | | | 42 | 0 | 0 |
| 2.16.03.1.01.02 | - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain | Jumlah Hosting Domain dan Subdomain terkelola di Data Center DKISP | 38 Aplikasi | | | | | 28 | 0 | 0 |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 - 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---------------------|--|---|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2021 | Realisasi Renja PD Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | |
| 2.16.03.1.01.03 | - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 39 OPD | | | | | 32 | 0 | 0 |
| 2.16.03.1.02 | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Indeks nilai domain Layanan SPBE | 3.5 Nilai Indeks | | | | | | | |
| 2.16.03.1.02.01 | - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1 Dokumen | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.03.1.02.02 | - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 5 Dokumen | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.03.1.02.03 | - Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah | Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC, ruang server) dan/atau pusat data | 42 OPD | | | | | 32 | 0 | 0 |
| 2.16.03.1.02.04 | - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Menggunakan/Memanfaatkan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 60 Kegiatan | | | | | 40 | 0 | 0 |
| 2.16.03.1.02.07 | - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi Berbagi Pakai yang dikembangkan / dikelola | 4 Aplikasi | | | | | 0 | 0 | 0 |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 - 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|---|---|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2021 | Realisasi Renja PD Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.16.03.1.02.08 | - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online | 135 Aplikasi | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Jumlah layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah | 40 Aplikasi | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.03.1.02.09 | - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas Kota Cerdas | Jumlah kegiatan fasilitasi penyediaan dan pengembangan ekosistem dalam rangka pemanfaatan infrastruktur pita lebar di daerah dalam mendukung penyelenggaraan e-government | 10 Kegiatan | | | | | 2 | 0 | 0 |
| | | Jumlah kegiatan fasilitasi literasi digital | 5 Kegiatan | | | | | 1 | 0 | 0 |
| 2.16.03.1.02.10 | - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah ASN pengelola infrastruktur TIK Pemerintah daerah yang mengikuti pelatihan dan pembinaan | 16 Orang | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Jumlah masyarakat yang mengikuti program pelatihan bidang digital | 400 Orang | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Jumlah Kegiatan Kemitraan dengan pelaku ekosistem startup daerah | 8 Kegiatan | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.03.1.02.11 | - Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah Laporan pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | 5 Laporan | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.03.1.02.12 | - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem SPBE | 34 Kegiatan | | | | | 0 | 0 | 0 |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 - 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|--|---|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2021 | Realisasi Renja PD Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (PD) YANG MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA STATISTIK SEKTORAL | 96 % | | | | | 95 | 95 | 98.96 |
| 2.20.02.1.01 | - <i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</i> | <i>Jumlah Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral</i> | 40 PD | | | | | | | |
| 2.20.02.1.01.01 | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Perangkat Daerah yang diverifikasi dan dipublikasikan data sektoralnya | 40 PD | | | | | 40 | 0 | 0 |
| 2.20.02.1.01.02 | - Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 200 Orang | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.20.02.1.01.03 | - Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Metadata Statistik Sektoral | 40 PD | | | | | 20 | 0 | 0 |
| 2.20.02.1.01.05 | - Pengembangan infrastruktur | Jumlah Aplikasi data Statistik Sektoral yang dikelola | 1 Aplikasi | | | | | 1 | 0 | 0 |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI | TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH | 80 % | | | | | 40 | 40 | 50 |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 - 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|---|---|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2021 | Realisasi Renja PD Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.21.02.1.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk Pengamanan Informasi Perangkat Daerah | 25 PD | | | | | | | |
| 2.21.02.1.01.01 | - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah provinsi | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi | 6 Kebijakan | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.21.02.1.01.02 | - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi | 10 5 | | | | | 2 | 0 | 0 |
| 2.21.02.1.01.03 | - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non-elektronik | Jumlah sistem elektronik yang menerapkan pengamanan informasi | 15 Aplikasi | | | | | 3 | 0 | 0 |
| 2.21.02.1.01.04 | - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah permohonan layanan keamanan informasi yang terpenuhi | 5 Pelayanan | | | | | 1 | 0 | 0 |
| 2.21.02.1.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah yang memanfaatkan Jaring Komunikasi Sandi | 25 PD | | | | | | | |
| 2.21.02.1.02.01 | - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah yang memanfaatkan Jaring Komunikasi Sandi | 25 PD | | | | | 0 | 0 | 0 |

Sumber : Data diolah, Mei 2022



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Jenis indikator sudah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, yang disesuaikan menurut tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, dengan format Tabel 2.2 sebagai berikut :



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | Proyeksi | | | Catatan Analisis |
|----------------------------|--|-------------------|------|------|------|-------------------|----------|------|------|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| INDIKATOR TUJUAN : | | | | | | | | | | |
| | Indeks SPBE | | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 |
| INDIKATOR SASARAN : | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah desa yang dapat mengakses layanan publik berbasis elektronik | | 168 | 247 | 326 | 197 | 168 | 247 | 326 | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 |
| 2 | Nilai Domain Layanan SPBE | | 3 | 3,3 | 3,7 | 3,25 | 3 | 3,3 | 3,7 | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 |
| 3 | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 |
| 4 | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 |
| 5 | Capaian Skor Indeks Keamanan Informasi | | 85 | 100 | 115 | 85 | 85 | 100 | 115 | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | Proyeksi | | | | Catatan Analisis |
|----------------------------|---|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|----------|---------|---------|---|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| INDIKATOR PROGRAM : | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 2 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. | | 60 % | 65 % | 70 % | 0,1 | 60 % | 65 % | 70 % | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 3 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. | | 78,04 % | 87,80 % | 95,12 % | 53,66 % | 78,04 % | 87,80 % | 95,12 % | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. | | 70 % | 75 % | 85 % | 65 % | 70 % | 75 % | 85 % | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 4 | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral | | 95 % | 95 % | 96 % | 95 % | 95 % | 95 % | 96 % | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 5 | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah. | | 40 % | 40 % | 60 % | 20 % | 40 % | 40 % | 60 % | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | Proyeksi | | | | Catatan Analisis |
|-----------------------------|--|-------------------|--------|--------|---------|-------------------|----------|--------|---------|---|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| INDIKATOR KEGIATAN : | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | | 11 Dok | 11 Dok | 11 Dok | 12 Dok | 11 Dok | 11 Dok | 11 Dok | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 2 | Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 3 | Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 4 | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 5 | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 6 | Jumlah BMD yang diadakan | | - | - | 10 Unit | 26 Unit | - | - | 10 Unit | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 7 | Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | Proyeksi | | | | Catatan Analisis |
|----|--|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|----------|---------|---------|---|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 8 | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya | | 33 Unit | 47 Unit | 48 Unit | 25 Unit | 33 Unit | 47 Unit | 48 Unit | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 9 | Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi | | 65 | 70 | 75 | 0 | 65 | 70 | 75 | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 10 | Indeks nilai domain Tata Kelola SPBE | | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,14 | 1,5 | 2 | 2,5 | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 11 | Indeks nilai domain Layanan SPBE | | 2,5 | 2,75 | 3 | 2,17 | 2,5 | 2,75 | 3 | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 12 | Jumlah Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral | | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 13 | Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk Pengamanan Informasi Perangkat Daerah | | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |
| 14 | Jumlah Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah yang memanfaatkan Jaring Komunikasi Sandi | | 4 | 9 | 14 | 0 | 4 | 9 | 14 | *Penentuan proyeksi 2022-2024 berdasarkan renstra 2021-2026 | |

Sumber : Data diolah, Mei 2022



2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan 3 (tiga) Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Aplikasi Informatika;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Statistik Sektoral;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- f. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara merumuskan kebijakan dan merencanakan program dan kegiatan / sub kegiatan dengan melihat dan mempertimbangkan isu - isu penting yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara antara lain :

- 1) Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik

Upaya peningkatan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan informasi publik



sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik belum begitu optimal dilakukan. Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh subdomain website SKPD/Organisasi dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara belum digunakan secara maksimal sebagai sarana untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Tantangan utama dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kalimantan Utara adalah pada aspek kesiapan aparat pemerintah. Terbatasnya SDM dan rendahnya pemahaman aparat terhadap substansi dari kebijakan menjadi penyebab kurang siapnya aparat dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Disamping itu, minimnya dukungan anggaran dan terbatasnya jangkauan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kendala sekaligus tantangan dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source), saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi publik ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus difasilitasi agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi publik yang tersebar di masyarakat.

Berbagai bentuk fasilitasi kelompok-kelompok komunikasi publik di masyarakat mutlak dilakukan agar proses pengikutsertaan masyarakat



dalam pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kelompok - kelompok komunikasi publik dimaksud dapat digolongkan dalam berbagai bentuk seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Massa. Sejak berdirinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian hingga sekarang belum pernah dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat di Kalimantan Utara. Komisi Informasi Daerah yang sudah ada masih dianggap belum maksimal kinerjanya ditambah belum jelasnya pembiayaan Komisi Informasi Daerah.

2) Belum Optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berbagai aplikasi teknologi digital digunakan dan diterapkan sebagai bagian budaya kerja baru pelayanan publik. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik seperti sistem aplikasi *e-office*, sistem aplikasi perencanaan, sistem aplikasi penganggaran, sistem aplikasi monitoring dan evaluasi, serta sistem aplikasi informasi kepegawaian menjadi diterapkan. Kondisi pandemi juga mendorong birokrasi bekerja dengan aplikasi komunikasi dan kolaborasi berbasis digital. Seperti video dan *web conference: Zoom, Google Meet*, media sosial, penyimpanan awan (*cloud storage*), *virtual private network* dan aplikasi digital lainnya. Karena itu, kondisi pandemi dan masa-masa *work from home* bisa dijadikan laboratorium dan praktik bagi birokrasi untuk terus mengembangkan ide - ide dan kreativitas untuk menghasilkan karya terbaik memberikan pelayanan publik. Implementasi *e-governance* harus diperluas dan ditingkatkan pemanfaatannya dalam upaya mewujudkan paradigma *new public governance* yang juga hendak kita capai sebagai hasil reformasi birokrasi tahap akhir saat ini.

Penyebab daripada belum optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kalimantan Utara sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Belum terbentuknya dewan pengawasan dan sinkronisasi penyelenggaraan SPBE;
- Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE;
- Belum tersedianya pedoman penatalaksanaan tata kelola TIK;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang TIK.



Isu - isu ini menjadi penting untuk dikemukakan dalam pembangunan jangka menengah mendatang. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang yang menempatkan peningkatan pelayanan pemerintah provinsi sebagai salah satu sasaran pokoknya. Apalagi ditingkat nasional juga diagendakan untuk membangun “peningkatan transformasi pelayanan publik,” maka tepatlah isu ini menjadi perhatian dan ditempatkan sebagai isu strategis bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tuntutan Masyarakat Transparansi Internasional juga memuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dan keefektifan. Semua ini akan terjawab dengan lebih baik jika permasalahan SDM pemerintahan baik secara kuantitas dan kualitas berikut sarana prasarannya memadai dapat terselesaikan. Isu strategis ini merupakan pengerucutan dari permasalahan tersebut di atas: kecukupan SDM (kuantitas, kualitas dan sebarannya), sarana dan prasarana (tempat pelayanan, jaringan pelayanan, dan instrument lainnya), serta metoda pelayanan kepada masyarakat, serta permasalahan lain yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik bagi Provinsi Kalimantan Utara.

3) Masih Rendahnya Aksesibilitas dan Dukungan Penyediaan Layanan Infrastruktur Telekomunikasi

Aksesibilitas dipengaruhi oleh jaringan penghubung, apapun bentuknya, dan kelengkapan jaringan sangat ditentukan oleh keberadaan infrastruktur (fisik, digital, atau bentuk lain). Oleh karena itu berangkat dari kondisi riil yang menunjukkan kurangnya ketersediaan infrastruktur di sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Utara (bukan hanya wilayah berkembang di sisi timur) perlu peningkatan ketersediaan infrastruktur yang lebih merata, terutama pada daerah separuh Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bagian barat pegunungan dan di sekitar perbatasan negara.

Jangkauan jaringan komunikasi dan internet sebagai media komunikasi dan informasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara belum mampu menjangkau seluruh wilayah. Kondisi ini kurang mendukung berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Sebagai wilayah yang memiliki desa - desa yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, komunikasi dan informasi menjadi sangat penting bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, khususnya yang tinggal di perbatasan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur ini tidak



hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, namun juga akan mendukung peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat seiring bertambahnya jaringan untuk pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya.

Penyediaan infrastruktur BTS (*Base Transmitter Station*) adalah penyediaan layanan *mobile broadband* atau menara jaringan seluler di daerah yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler, khususnya di daerah - daerah non komersial dan 3T yang masih dalam keadaan tidak terlayani. Rendahnya permintaan pasar terhadap akses telekomunikasi dan tidak adanya aspek bisnis di daerah non komersial dan 3T menyebabkan penyelenggara seluler enggan untuk membangun infrastruktur TIK seperti BTS di daerah - daerah tersebut.

Faktor - faktor lain yang mempengaruhi permasalahan masih Rendahnya Aksesibilitas dan Dukungan Penyediaan Layanan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

- a) Keterbatasan Kewenangan pemerintah daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pembangunan infrastruktur layanan Telekomunikasi adalah kewenangan Pemerintah Pusat untuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) dan Lokpri (Lokasi Prioritas), sedangkan selain dari daerah tersebut kewenangan diberikan kepada penyelenggara Telekomunikasi (Provider).
- b) Sulitnya kondisi geografis dan luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk membangun infrastruktur layanan Telekomunikasi;
- c) Kesenjangan jumlah penduduk yang menduduki suatu wilayah.

Pemerintah daerah dapat melakukan sinergitas program dengan kemenkominfo melalui kegiatan survey titik layanan publik yang memiliki & tidak memiliki akses internet; survey lokasi / lahan untuk penyediaan pembangunan BTS; serta dukungan regulasi / kebijakan kemudahan perizinan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan standarisasi gedung dan bangunan. Hal ini tentu disesuaikan dengan kewenangan yang diatur didalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyediaan BTS di daerah non-komersial dan 3T yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler ini dilakukan berdasarkan lokasi-lokasi yang telah ditetapkan melalui peraturan antara



lain Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 - 2024, Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020 - 2024 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau - Pulau Kecil Terluar, serta usulan - usulan dari Pemerintah Daerah.

4) Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral belum Optimal

Dengan adanya Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian mendapat tugas untuk penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral. Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai wali data yang memiliki tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan kewenangan daerah.

Disisi lain, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara untuk mendukung percepatan penyelenggaraan SDI secara kolaboratif, terintegrasi dan menyeluruh dalam mendukung program pemulihan nasional maupun dalam pemenuhan data statistik sektoral yang cepat, akurat, dan akuntabel sebagai pendukung perencanaan pembangunan maupun sebagai layanan kepada masyarakat.

Data statistik sektoral yang dipublish harus memenuhi standar data, dilengkapi dengan metadata dan harus memenuhi prinsip interoperabilitas data. Permasalahan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Belum Optimal di Kalimantan Utara dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- Belum optimalnya pengumpulan data statistik sektoral yang cepat dan tepat;
- Belum terintegrasinya data statistik sektoral kabupaten / kota;



- Belum optimalnya koordinasi stakeholder ;
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan *e-government*.

5) Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum Optimal

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat serangan siber saat ini semakin masif serta menyerang critical resource (sumber daya sangat penting). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasikan SNI ISO/IEC 27001 pada layanannya dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Permasalahan / isu belum optimalnya Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

- 1) Minimnya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian dalam rangka peningkatan *Cyber Security* Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- 2) Ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi masih rendah;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi;
- 4) Belum terbentuknya sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah ;
- 5) Kurangnya kesadaran ASN Pemerintah Daerah tentang keamanan informasi pemerintah daerah.

Sebagai indikator tercapainya visi daerah salah satunya dapat ditandai dengan meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government*) yang didukung dengan jaminan keamanan informasi yang mumpuni. Pembentukan sistem keamanan informasi di Provinsi Kalimantan Utara berguna untuk meningkatkan Indeks Maturitas



Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks Maturitas SPBE).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Setelah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023, ada perbedaan diantara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, semua rumusan program dan kegiatan / sub kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan rancangan awal RKPD baik dari program dan kegiatan / sub kegiatannya maupun dari besaran anggarannya, seperti pada lampiran tabel 2.3 berikut ini:



Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---------------|---|----------------|-------------------------|---|---------------|--|----------------|-------------------------|--|-----------------|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Tanjung Selor | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi | 100 % | 9.104.624 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Tanjung Selor | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi | 100 % | 9.533.023 | | |
| | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tanjung Selor | | 11 Dokumen | 130.630 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tanjung Selor | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 11 Dokumen | 96.000 | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 1 Dokumen | 26.168 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 76.000 | Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pada TA. 2023 | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tanjung Selor | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya | 1 Dokumen | 20.800 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - Dokumen | - | Anggaran dialihkan ke sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tanjung Selor | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya | 1 Dokumen | 6.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - Dokumen | - | Anggaran dialihkan ke sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tanjung Selor | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya | 1 Dokumen | 6.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | - Dokumen | - | Anggaran dialihkan ke sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting | |
|---------------------|---|----------------------|---|----------------|--------------|--------------------------|---|----------------------|--|----------------|--------------|------------------|--|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Pagu Indikatif (Rp.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tanjung Selor | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya | 1 | Dokumen | 6.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | - | Dokumen | - | Anggaran dialihkan ke sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya | 4 | Laporan | 32.962 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | Laporan | - | Anggaran dialihkan ke sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 | Laporan | 32.700 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 | Laporan | 20.000 | Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pada TA. 2023 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 | bulan | 7.284.478 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 | bulan | 7.288.120 | |
| 8 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tanjung Selor | Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN | 12 | bulan | 6.228.757 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tanjung Selor | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 | Org/Bulan | 6.414.660 | - Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan dan Jumlah ASN pada TA. 2023; - Perubahan Target, Satuan dan Indikator menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Th. 2021 |
| 9 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tanjung Selor | Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 | bulan | 699.721 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 | Dokumen | 873.460 | - Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada TA. 2023; - Perubahan Target, Satuan dan Indikator menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Th. 2021 |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKP | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting | |
|--------------------|---|----------------------|---|----------------|--------------|--------------------------|---|----------------------|--|----------------|--------------|-----------------|--|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Pagu Indikatif (Rp.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 10 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tanjung Selor | Jumlah layanan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | bulan | 150.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | Dokumen | - | Anggaran dialihkan ke sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 11 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya | 1 | laporan | 4.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | Laporan | - | |
| 12 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya | 18 | laporan | 4.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | - | Laporan | - | |
| 13 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tanjung Selor | Jumlah laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 | laporan | 198.000 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | Dokumen | - | Anggaran dialihkan ke sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12 | bulan | 25.600 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | bulan | - | |
| 14 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi/disusun | 1 | laporan | 21.600 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | Laporan | - | Anggaran dialihkan ke sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 15 | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Tanjung Selor | Jumlah layanan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 | bulan | 4.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | Laporan | - | Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pada TA. 2023 |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting | |
|---------------------|---|----------------------|---|----------------|--------------|--------------------------|---|----------------------|---|----------------|--------------|-----------------|---|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Pagu Indikatif (Rp.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 | bulan | 134.294 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 | bulan | 32.000 | |
| 16 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tanjung Selor | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan | - | setel/buah | - | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tanjung Selor | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | - | Paket | - | |
| 17 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Tanjung Selor | Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dimutakhirkan | 12 | sistem | 16.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - | Dokumen | - | Anggaran dialihkan ke sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 18 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tanjung Selor | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 30 | orang | 118.294 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tanjung Selor | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 | Orang | 32.000 | Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pada TA. 2023 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 | bulan | 349.262 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 | bulan | 329.013 | |
| 19 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tanjung Selor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 12 | buah/unit | 126.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tanjung Selor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 | Paket | 24.734 | - Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pada TA. 2023; - Perubahan Target, Satuan dan Indikator menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Th. 2021. |
| 20 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tanjung Selor | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 25 | buah/unit | 6.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tanjung Selor | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 | Paket | 38.483 | - Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pada TA. 2023; - Perubahan Target, Satuan dan Indikator menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Th. 2021. |
| 21 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tanjung Selor | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 | bulan | 103.997 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tanjung Selor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 8 | Paket | 111.475 | - Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pada TA. 2023; |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting | |
|---------------------|---|----------------------|--|----------------|-------------|--------------------------|---|----------------------|---|----------------|-------------|-----------------|---|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Pagu Indikatif (Rp.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | - Perubahan Target, Satuan dan Indikator menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Th. 2021. |
| 22 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tanjung Selor | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 | bulan | 18.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tanjung Selor | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 | Paket | 150.720 | - Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pada TA. 2023; - Perubahan Target, Satuan dan Indikator menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Th. 2021. |
| 23 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tanjung Selor | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 1460 | eksemplar | 12.765 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 12 | Dokumen | 3.600 | - Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pada TA. 2023; - Perubahan Target, Satuan dan Indikator menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Th. 2021. |
| 24 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | bulan | 82.500 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | Laporan | - | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tanjung Selor | Jumlah BMD yang diadakan | - | unit | - | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tanjung Selor | Jumlah BMD yang diadakan | - | unit | - | |
| 25 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tanjung Selor | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan | - | unit | - | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tanjung Selor | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - | Unit | - | |
| 26 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tanjung Selor | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan | - | unit | - | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tanjung Selor | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | Unit | - | |
| 27 | Pengadaan Mebel | Tanjung Selor | Jumlah Mebel yang diadakan | - | unit | - | Pengadaan Mebel | Tanjung Selor | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | Paket | - | |
| 28 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Tanjung Selor | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan | - | unit | - | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Tanjung Selor | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | - | Unit | - | |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting | |
|---------------------|--|---------------|---|----------------|-------|--------------------------|--|---------------|--|----------------|---------|-----------------|---|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Pagu Indikatif (Rp.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | 12 | bulan | 1.025.360 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | 12 | bulan | 1.511.920 | |
| 29 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tanjung Selor | Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan | 12 | bulan | 14.800 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | Laporan | 30.000 | - Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pada TA. 2023; - Perubahan Target, Satuan dan Indikator menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Th. 2021. |
| 30 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tanjung Selor | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | - | bulan | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | Laporan | - | |
| 31 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tanjung Selor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 12 | bulan | 210.560 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | Laporan | - | |
| 32 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tanjung Selor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 | bulan | 800.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 1.481.920 | Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pada TA. 2023. |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya | 47 | Unit | 155.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya | 56 | Unit | 275.970 | |
| 33 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tanjung Selor | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya | 18 | unit | 105.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tanjung Selor | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 15 | unit | 138.290 | Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pada TA. 2023. |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting | |
|---------------------|---|---------------|---|----------------|-----------|--------------------------|---|---------------|---|----------------|---------|-----------------|--|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Pagu Indikatif (Rp.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 34 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tanjung Selor | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa yang disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya | 2 | unit | 25.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tanjung Selor | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 | Unit | 111.680 | Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pada TA. 2023. |
| 35 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tanjung Selor | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan | 15 | unit | 25.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tanjung Selor | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 | Unit | 26.000 | Perubahan anggaran menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pada TA. 2023. |
| 36 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Tanjung Selor | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dilakukan pemeliharaan | 12 | unit | - | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Tanjung Selor | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | - | Unit | - | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Tanjung Selor | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi | 65 | % | 6.580.000 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Tanjung Selor | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi | 65 | % | 20.608.089 | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi | 70 | Media | 6.580.000 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi | 70 | Media | 20.608.089 | |
| 37 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Tanjung Selor | Jumlah Kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik yang dihasilkan | - | Kebijakan | - | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | - | Dokumen | - | |
| 38 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Tanjung Selor | Jumlah laporan hasil monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), survei, jajak pendapat dan pengelolaan aduan masyarakat. | 1 | Laporan | 250.000 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | - | Dokumen | - | Sesuai Berita Acara Rekortekrenbang TA. 2023, sebagai dukungan terhadap Pencapaian Target Kinerja Pusat Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Yaitu "Meningkatnya |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting | |
|---------------------|--|---------------|--|----------------|----------|--------------------------|--|---------------|---|----------------|---------|-----------------|---|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Pagu Indikatif (Rp.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah" |
| 39 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Tanjung Selor | Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum | - | Kegiatan | - | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | - | Dokumen | - | |
| 40 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Tanjung Selor | Jumlah Konten dan media komunikasi publik yang di kelola | 12 | Konten | 200.000 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | - | Dokumen | - | Sesuai Berita Acara Rekortekrenbang TA. 2023, sebagai dukungan terhadap Pencapaian Target Kinerja Pusat Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Yaitu "Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah" |
| 41 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Tanjung Selor | Jumlah Media Komunikasi publik Yang Dikelola | - | Media | - | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | - | Dokumen | - | |
| 42 | Pelayanan Informasi Publik | Tanjung Selor | Jumlah perangkat daerah yang melakukan pemutakhiran informasi publik | 41 | PD | 280.000 | Pelayanan Informasi Publik | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | - | Dokumen | - | Sesuai Berita Acara Rekortekrenbang TA. 2023, sebagai dukungan terhadap Pencapaian Target Kinerja Pusat Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Yaitu "Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah" |
| 43 | Layanan Hubungan Media | Tanjung Selor | Jumlah media publikasi | 5 | Media | 400.000 | Layanan Hubungan Media | Tanjung Selor | Jumlah Layanan Hubungan Media | - | Layanan | - | |
| 44 | Manajemen Komunikasi Krisis | Tanjung Selor | Jumlah Laporan pengelolaan komunikasi krisis di daerah | - | Laporan | - | Manajemen Komunikasi Krisis | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis | - | Dokumen | - | |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKP | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting | |
|--------------------|--|---------------|--|----------------|----------|--------------------------|--|---------------|---|----------------|---------|-----------------|---|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Pagu Indikatif (Rp.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 45 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Tanjung Selor | Jumlah Sosialisasi / Bimtek Keterbukaan Informasi Publik | 1 | Kegiatan | 150.000 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Tanjung Selor | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya | 20 | Orang | 201.850 | Sesuai Berita Acara Rekortekrenbang TA. 2023, sebagai dukungan terhadap Pencapaian Target Kinerja Pusat Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Yaitu "Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah" |
| 46 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Penyediaan operasional Komisi Informasi dan penyelesaian sengketa informasi di Prov. Kalimantan Utara | 12 | Bulan | 700.000 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 12 | Dokumen | 633.000 | Sesuai Berita Acara Rekortekrenbang TA. 2023, sebagai dukungan terhadap Pencapaian Target Kinerja Pusat Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Yaitu "Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah" |
| 47 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Tanjung Selor | Jumlah Kerjasama dengan Media dan kemitraan komunitas nasional dan daerah | 10 | Kelompok | 3.100.000 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 30 | Dokumen | 16.075.240 | Sesuai Berita Acara Rekortekrenbang TA. 2023, sebagai dukungan terhadap Pencapaian Target Kinerja Pusat Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Yaitu "Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah" |
| 48 | Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi yang tersedia | 1 | Unit | 1.500.000 | Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | 3 | Unit | 3.698.000 | Sesuai Berita Acara Rekortekrenbang TA. 2023, sebagai dukungan terhadap Pencapaian Target Kinerja Pusat Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Yaitu "Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah" |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting | |
|---------------------|---|---------------|---|----------------|--------------|--------------------------|---|---------------|---|----------------|--------------|-----------------|--|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Pagu Indikatif (Rp.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | - Mengakomodir Usulan Pokir DPRD Provinsi Kalimantan Utara |
| | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Tanjung Selor | 1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 87,80 | % | 2.908.500 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Tanjung Selor | 1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 87,80 | % | 3.427.216 | |
| | | | 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 75 | % | | | | 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 75 | % | | |
| | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Indeks nilai domain Tata Kelola SPBE | 2 | Nilai Indeks | 1.774.000 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Indeks nilai domain Tata Kelola SPBE | 2 | Nilai Indeks | 1.832.672 | |
| 49 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah perangkat daerah memiliki portal dan situs web yang terdaftar | 42 | OPD | 30.000 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | 1 | Domain | 30.000 | Perubahan target sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 50 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Hosting Domain dan Subdomain terkelola di Data Center DKISP | 31 | Aplikasi | 100.000 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 12 | Dokumen | 120.000 | Perubahan target sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting | |
|---------------------|--|----------------------|---|----------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------------|---------------------|------------------|--|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Pagu Indikatif (Rp.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 51 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Tanjung Selor | Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 36 | OPD | 1.644.000 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 40 | Unit | 1.682.672 | - Sewa Bandwidth untuk penyediaan Jaringan Internet bagi Perangkat Daerah - Sesuai Berita Acara Rekortekrenbang TA. 2023, sebagai dukungan terhadap Pencapaian Target Kinerja Pusat Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Yaitu "Tersedianya Infrastruktur Digital". |
| | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah | Tanjung Selor | Indeks nilai domain Layanan SPBE | 2.75 | Nilai Indeks | 1.134.500 | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah | Tanjung Selor | Indeks nilai domain Layanan SPBE | 2.75 | Nilai Indeks | 1.594.543 | |
| 52 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1 | Dokumen | 150.000 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1 | Dokumen | 20.059 | Anggaran penyusunan dokumen arsitektur SPBE dikurangi. Dikarenakan telah dilaksanakan pada tahun 2022. Sehingga anggaran ini hanya untuk review dan dialihkan ke anggaran penyusunan rencana induk. |
| 53 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1 | Dokumen | 30.000 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1 | Dokumen | 160.000 | Anggaran penyusunan dokumen rencana induk ditambahkan menjadi Rp 160.000.000. Dikarenakan akan dilakukan penyesuaian rencana induk sesuai dengan RPJMD tahun 2021 - 2026 |
| 54 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Tanjung Selor | Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC, ruang server) dan/atau pusat data | 36 | OPD | 20.000 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 1 | Unit | 118.985 | sebelumnya pada tahun 2018 DKISP sudah membuat dokumen masterplan atau rencana induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), namun untuk menyesuaikan dengan RPJMD Kaltara Tahun 2021-2026 maka perlu dilakukan review agar rencana induk tersebut tepat sasaran dan sejalur untuk |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKP | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting | |
|--------------------|--|---------------|---|----------------|----------|--------------------------|--|---------------|---|----------------|------------------|-----------------|--|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Pagu Indikatif (Rp.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | mendukung visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi." |
| 55 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Kegiatan Fasilitas Menggunakan/Memanfaatkan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 40 | Kegiatan | 36.000 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 12 | Dokumen | 122.775 | Sub kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kekurangan peralatan jaringan server untuk Data Center Provinsi Kalimantan Utara. |
| 56 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Tanjung Selor | Jumlah Kegiatan Peningkatan, Peninjauan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | - | Kegiatan | - | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | - | Dokumen | - | |
| 57 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Tanjung Selor | Jumlah Perangkat Daerah yang Memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data | - | PD | - | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Tanjung Selor | Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | - | Perangkat Daerah | - | |
| 58 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tanjung Selor | Jumlah Aplikasi Berbagi Pakai yang dikembangkan / dikelola | - | Aplikasi | - | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tanjung Selor | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan | - | Unit | - | |
| 59 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Tanjung Selor | Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online | - | Aplikasi | - | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Tanjung Selor | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | - | Layanan | - | a. Anggaran Sistem Penghubung Layanan ditambahkan untuk mengalokasikan pembuatan Government Service Bus (GSB) Provinsi Kalimantan Utara. Yang mana selama ini Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki GSB. b. GSB Sendiri Merupakan sebuah sistem penghubung layanan pemerintah yang dapat menghubungkan antara aplikasi di tiap-tiap OPD. |
| | | | Jumlah layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah | - | Aplikasi | | | | | | | | |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKP | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting |
|--------------------|--|---------------|---|----------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | <p>berdasarkan berita acara hasil pembahasan desk urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika pada Rakortekbang 2023 antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa salah satu poin pendukung capaian nasional yaitu pada poin terlaksananya layanan pemerintah secara digital.</p> <p>Dengan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Aplikasi Umum SPBE yang digunakan oleh Pemda (sudah sesuai target nasional 100%); 2. Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah. <p>untuk poin 2 tersebut provinsi kaltara sejauh ini hanya menggunakan kaltarparov.go.id sebagai penghubung, namun hal tersebut tidak sesuai dengan indikator yang dimaksud, oleh karena itu diharapkan dengan adanya sistem penghubung layanan pemerintah daerah, dapat meningkatkan indeks capaian SPBE dan juga meningkatkan pencapaian target pada indikator desk kewilayahan provinsi kaltara.</p> | |
| 60 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem | Tanjung Selor | Jumlah kegiatan fasilitasi penyediaan dan | 2 | Kegiatan | 615.000 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang | 3 | Dokumen | 854.724 |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKP | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting | | |
|--------------------|---|---------------|---|----------------|----------|--------------------------|---|---------------|--|----------------|-----------------|-------------------------|---|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| | Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas | | pengembangan ekosistem dalam rangka pemanfaatan infrastruktur pita lebar di daerah dalam mendukung penyelenggaraan e-government | | | | Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas | | diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City | | | | Program Inovasi yang dilaksanakan sebanyak 3 inovasi yaitu Vsat Sekolah, Wifi Gratis |
| | | | Jumlah kegiatan fasilitasi literasi digital | 1 | Kegiatan | | | | | | | | |
| 61 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Tanjung Selor | Jumlah ASN pengelola infrastruktur TIK Pemerintah daerah yang mengikuti pelatihan dan pembinaan | 4 | Orang | 60.000 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 4 | Dokumen | 60.000 | Sub Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kompetensi Masyarakat di Bidang Digital sesuai dengan berita acara hasil pembahasan desk urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika pada Rakortekbang 2023 antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimana beberapa indikatornya yaitu : 1. Jumlah ASN Pengelola SPBE yang mendapatkan Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengelolaan SPBE -> target daerah 80 orang. 2. Presentase Masyarakat yang mendapatkan Literasi dan/atau sosialisasi SPBE -> target daerah 2% dari jumlah populasi Kaltara untuk golongan umur 17th keatas. Dengan adanya atau ditambahkannya anggaran pada sub kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target Provinsi Kalimantan Utara terkait |
| | | | Jumlah masyarakat yang mengikuti program pelatihan bidang digital | 100 | Orang | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Kemitraan dengan pelaku ekosistem startup daerah | 2 | Kegiatan | | | | | | | | |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKP | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting | |
|--------------------------------------|--|---------------|--|----------------|----------|--------------------------------------|--|---------------|--|----------------|---------|-----------------|---|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Pagu Indikatif (Rp.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | peningkatan kompetensi tersebut. |
| 62 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Tanjung Selor | Jumlah Laporan pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | 1 | Laporan | 98.500 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | - | Dokumen | - | |
| 63 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Tanjung Selor | Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem SPBE | 6 | Kegiatan | 125.000 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | 4 | Dokumen | 258.000 | Sub kegiatan ini digunakan untuk : 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (berkaitan dengan pengadaan, penyewaan dan kerjasama di kabupaten/kota terkait infrastruktur TIK guna mendukung ekosistem SPBE. 2. Mendukung salah satu indikator desk kewilayahan terkait : presentase masyarakat yang menadapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE. 3. Meningkatkan indeks Capaian SPBE Kabupaten/Kota dengan melakukan pembinaan terkait Domain SPBE yang belum dan tidak diterapkan 4. Serta evaluasi terkait pengelolaan SPBE di Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara. |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tanjung Selor | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral | 95 | % | 165.826 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tanjung Selor | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral | 95 | % | 801.150 | |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting | |
|---------------------|--|---------------|---|----------------|-------|--------------------------|---|---------------|---|----------------|---------|-----------------|---|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Pagu Indikatif (Rp.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral | 38 | PD | 165.826 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | | Jumlah Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral | 38 | PD | 801.150 | |
| 64 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Tanjung Selor | Jumlah Perangkat Dearah yang diverifikasi dan dipublikasikan data sektoralnya | 40 | PD | 72.826 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Tanjung Selor | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 | Dokumen | 712.000 | - Kegiatan ini menghasilkan 1 dokumen yang berisi data sektoral dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara guna menyediakan data statistik untuk mendukung perencanaan daerah, hal ini sejalan dengan target nasional 2023 yang ingin meningkatkan Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tiap tahunnya serta Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar. - Pemanfaatan data statistik sebagai faktor fundamental pembangunan. |
| 65 | Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Tanjung Selor | Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 50 | Orang | 43.000 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Tanjung Selor | Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 50 | Orang | 79.150 | Sesuai Berita Acara Rekrortekrenbang TA. 2023, sebagai dukungan terhadap Pencapaian Target Kinerja Pusat Urusan Statistik yaitu : 1. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN; 2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | Catatan Penting | |
|--|---|---------------|--|----------------|-------------------------|--|---|-------------------|---|-------------------------|--|-----------------|--|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | menyampaikan metadata sektoral sesuai standar. | | |
| 66 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Tanjung Selor | Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Metadata Statistik Sektoral | - | PD | - | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Tanjung Selor | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | - | Dokumen | - | |
| 67 | Pengembangan infrastruktur | Tanjung Selor | Jumlah Aplikasi data Statistik Sektoral yang dikelola | 1 | Aplikasi | 50.000 | Pengembangan infrastruktur | Tanjung Selor | Jumlah Infrastruktur Statistik | 1 | Unit | 10.000 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN | Tanjung Selor | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 40 | % | 294.463 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN | Tanjung Selor | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 40 | % | 173.570 | |
| | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk Pengamanan Informasi Perangkat Daerah | 10 | PD | 269.463 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk Pengamanan Informasi Perangkat Daerah | 10 | PD | 173.570 | |
| 68 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi | 1 | Kebijakan | 20.000 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan | 1 | Dokumen | 28.010 | |
| 69 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi | 2 | Kegiatan | 108.597 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 2 | Laporan | 22.660 | - Dukungan Terhadap Capaian Skor Indeks Kematangan SPBE dalam hal Keamanan SPBE - Sesuai Berita Acara Rekortekrenbang TA. 2023, sebagai dukungan terhadap Pencapaian Kinerja Pusat Urusan Persandian yaitu: 1. Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah ; 2. Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| RANCANGAN AWAL RKP | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting | | |
|--------------------|--|----------------------|--|----------------|-----------|--------------------------|--|----------------------|---|----------------|------------------|-------------------------|---|
| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT 3. |
| 70 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non-elektronik | Tanjung Selor | Jumlah sistem elektronik yang menerapkan pengamanan informasi | 3 | Aplikasi | 55.866 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non-elektronik | Tanjung Selor | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 3 | Laporan | 89.650 | Dukungan Terhadap Capaian Skor Indeks Kematangan SPBE dalam hal Keamanan SPBE |
| 71 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah permohonan layanan keamanan informasi yang terpenuhi | 1 | Pelayanan | 85.000 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 2 | Perangkat Daerah | 33.250 | Dukungan Terhadap Capaian Skor Indeks Kematangan SPBE dalam hal Keamanan SPBE |
| | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah yang memanfaatkan Jaring Komunikasi Sandi | 9 | PD | 25.000 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah yang memanfaatkan Jaring Komunikasi Sandi | - | PD | - | |
| 72 | Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah yang memanfaatkan Jaring Komunikasi Sandi | 5 | PD | 25.000 | Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | - | Perangkat Daerah | - | Dukungan Terhadap Capaian Skor Indeks Kematangan SPBE dalam hal Keamanan SPBE |
| JUMLAH | | | | | | 19.053.413 | JUMLAH | | | | | 34.543.050 | |

Sumber : Data Diolah, Juli 2022



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program, kegiatan / sub kegiatan yang tercantum dalam Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara ini meliputi RKPD Provinsi Kalimantan Utara dan juga usulan pemangku kepentingan baik yang berasal dari Kabupaten / Kota maupun Pokok – Pokok Pikiran DPRD Provinsi yang telah disampaikan dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023. Adapun usulan dan permasalahan yang disampaikan yaitu :

1. Usulan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi. (Pokok – Pokok Pikiran DPRD);

Permasalahan : Tersedianya media informasi dan publikasi berupa melalui billboard dan stand baliho 10 Titik di Kota Tarakan.

2. Usulan : Pembangunan Tower / BTS serta ketersediaan jaringan Fiber Optik (Usulan Langsung (Masyarakat / Lembaga) - Usulan Kabupaten/Kota)

Permasalahan : Peningkatan jaringan di 14 Desa yang Blankspot dimana sinyal telekomunikasi baik 2G/3G dan 4G belum masuk dalam desa tersebut. Dan juga Ketersediaan Jaringan Optik Fiber baru mencakup ke 8 Desa yang ada di Kabupaten Tana Tidung dan belum merata.

Usulan tersebut telah dibahas melalui proses verifikasi bersama dengan Tim Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dan dapat diakomodir melalui program dan kegiatan / sub kegiatan yang telah ada dan sesuai dengan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 disertai dengan catatan sebagaimana tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara

Table with 6 columns: No, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Lokasi, Indikator Kinerja, Volume, Catatan. Row 1: 1, Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi *Usulan Pokok – Pokok Pikiran DPRD, Kota Tarakan, Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, Rp. 300.000.000,-, 1. Sebagai informasi pada Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pembuatan Stand Baliho di Kota Tarakan sejumlah 2 titik yaitu Tarakan Barat dan Tarakan Tengah dan pada Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan pembuatan Billboard



| | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|---|
| | | | | | <p>Digital (Videotron) di Kota Tarakan sejumlah 1 titik di Simpang 4;</p> <p>2. Jumlah Titik yang diakomodir sebanyak 2 Titik yaitu Tarakan Timur dan Tarakan Utara sesuai dengan Jumlah Kecamatan di Kota Tarakan;</p> <p>3. Memperhatikan Ketersediaan Lahan dan Lokasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan</p> |
| 2 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi *Usulan Kab-Kota | Kab. Tana Tidung | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City | - | Terkait usulan Pembangunan Tower / BTS serta ketersediaan jaringan Fiber Optik telah diakomodir dengan catatan sudah dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada sejumlah desa di Kalimantan Utara |

Sumber : Data Diolah, Mei 2022 (Hasil Berita Acara Verifikasi Usulan Musrenbang dan Pokok – Pokok Pikiran DPRD)



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

3.1.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional baik jangka panjang maupun menengah disusun untuk mempercepat perwujudan Visi Presiden Joko Widodo yang menggagas “Impian Indonesia 2015 - 2025”, yaitu: (1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, (2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, (3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia, (4) Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi, (5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, (6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik, dan (7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam mewujudkan impian tersebut, disusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Keempat pilar dalam Visi Indonesia 2045, Visi dan Misi, serta Arah-an Utama Presiden Republik Indonesia di atas, diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan yang dituangkan ke dalam RPJMN 2020-2024. Dengan tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong,” ketujuh agenda pembangunan beserta target-targetnya menjadi acuan penting terkait arah kebijakan dan strategi nasional maupun daerah.

Berikut adalah penjelasan dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) yang terdapat pada RPJMN 2020 - 2024:

1. (PN-1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. (PN-2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. (PN-3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. (PN-4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.



5. (PN-5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. (PN-6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. (PN-7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam mendukung pencapaian tujuh agenda pembangunan pada RPJMN 2020 - 2024, Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 - 2024 akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand).

Telekomunikasi merupakan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Ketersediaan layanan telekomunikasi di suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah memiliki kesadaran akan informasi. Terlebih di masa pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada akhir 2019, ketersediaan layanan telekomunikasi menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam berbagi informasi dan melakukan berbagai aktivitas dimanapun. Pandemi covid-19 yang terjadi hingga sekarang, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia dan percepatan digitalisasi di semua sektor terlebih lagi di wilayah Kalimantan Utara khususnya pada daerah terpencil dan daerah perbatasan. Selaras juga dengan arahan presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Kemenkominfo mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 fokus pada upaya percepatan Transformasi Digital Nasional. Arah kebijakan Kemenkominfo antara lain :

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik;
2. Mendorong penerapan Teknologi berorientasi ke depan;
3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital;
4. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan;
5. Mempercepat penyelesaian legislasi primer;



6. Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah;
7. Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal.

Berdasarkan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020 - 2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu untuk melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan komunikasi dan informatika baik berupa pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi serta pelayanan terkait keterbukaan informasi publik maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendapat tanggung jawab dalam mendukung pencapaian target pada Prioritas Nasional yaitu :

1. (PN-2) “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”
2. (PN-5) “Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, khususnya mendukung Program Prioritas Nasional untuk Transformasi Digital”
3. (PN-7) “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”

Sinergi Program dalam mendukung Prioritas Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Nasional

| Prioritas Nasional | Program yang Mendukung Prioritas Nasional | Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional | Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional | Lokasi Kegiatan |
|---|--|--|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (PN-2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Tanjung Selor |
| | | | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Tanjung Selor |
| (PN-5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Tanjung Selor |



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

| Prioritas Nasional | Program yang Mendukung Prioritas Nasional | Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional | Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional | Lokasi Kegiatan | |
|--|---|--|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas | Tanjung Selor | |
| | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Tanjung Selor | |
| (PN-7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Tanjung Selor | |
| | | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Tanjung Selor | |
| | | | Pelayanan Informasi Publik | Tanjung Selor | |
| | | | Layanan Hubungan Media | Tanjung Selor | |
| | | | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Tanjung Selor | |
| | | | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Tanjung Selor | |
| | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Tanjung Selor | |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | Tanjung Selor | |
| | | | Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Provinsi | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tanjung Selor |
| | | | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Tanjung Selor |
| | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | |
| | | | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | |
| | | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non-elektronik | Tanjung Selor | |
| | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor | |



| Prioritas Nasional | Program yang Mendukung Prioritas Nasional | Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional | Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional | Lokasi Kegiatan |
|--------------------|---|--|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor |
| Jumlah | 4 Program | 6 Kegiatan | 21 Sub Kegiatan | |

Sumber : Data Diolah, Mei 2022

3.1.2 Telaahan Terhadap Prioritas Provinsi

Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dalam 5 (lima) tahun ke depan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Visi yaitu “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera” dan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;



7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT / Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun;
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, Dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian mendapat tanggung jawab untuk mendukung Misi 2 “Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten / Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja” dengan fokus sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan profesional, efisien, efektif dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja. Kemudian mendukung Misi 5 “Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan” dengan fokus



sasaran meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan tema pembangunan tahun 2023 sesuai dengan tema / fokus pembangunan yang dimuat dalam RPJMD. Pada tahun 2023 yang menjadi tema / fokus pembangunan adalah “Pengembangan Industri Dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”. Tema ini mengisyaratkan bahwa pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 harus diarahkan pada pengembangan dan penguatan industri secara luas, meliputi: (1) industri primer, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan; (2) industri pengolahan; (3) industri ketenagalistrikan; (4) industri perdagangan dan jasa; (4) industri pariwisata dan ekonomi kreatif; (5) industri kecil dan menengah, dan industri lainnya. Karena, industri – industri tersebut merupakan industri yang menopang hajat hidup masyarakat sekaligus sebagai industri yang mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industrinya. Selain itu, pengembangan dan penguatan industri – industri tersebut berarti mendorong terjadinya peningkatan investasi. Namun, peningkatan investasi dalam industri harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

Tema atau fokus pembangunan tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara juga diarahkan untuk mewujudkan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat sepuluh prioritas pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam RPJMD dan akan dilaksanakan setiap tahun. Sepuluh prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tersebut meliputi :

1. Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan;
2. Mewujudkan pembangunan KIPI;
3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi : perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi di setiap kabupaten / kota;
4. Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa



- menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten / kota;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten / kota;
 6. Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten / kota;
 7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan kebangsaan;
 8. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milineal;
 9. Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten / kota;
 10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Indikasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 yang Mendukung Prioritas Daerah dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Indikasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah

| Prioritas Daerah | Program yang mendukung Prioritas Daerah | Kegiatan Yang mendukung Prioritas Daerah | Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Daerah | Lokasi Kegiatan |
|---|---|---|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PD-4 Meningkatkan terwujudnya konektivitas Kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Tanjung Selor |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | Tanjung Selor |
| | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Tanjung Selor |
| | | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Tanjung Selor |



| Prioritas Daerah | Program yang mendukung Prioritas Daerah | Kegiatan Yang mendukung Prioritas Daerah | Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Daerah | Lokasi Kegiatan |
|------------------|---|--|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Tanjung Sel |
| | | | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tanjung Selor |
| | | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Tanjung Selor |
| | | | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Tanjung Selor |
| | | | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas | Tanjung Selor |
| | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Tanjung Selor |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Tanjung Selor |
| Jumlah | 2 Program | 3 Kegiatan | 11 Sub Kegiatan | |

Sumber : Data Diolah, Mei 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara

Tujuan Pembangunan Urusan Pemerintahan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara adalah meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hal ini sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara 2021 – 2026 “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah Maju dan Sejahtera“ dimana visi tersebut memberikan substansi penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten / Kota sebagai pilar Provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat



Kalimantan Utara secara otonomi. Kemudian mewujudkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang maju ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

Perwujudan dari penguatan kebijakan ketatalaksanaan untuk mendorong proses birokrasi yang sederhana, cepat dan terintegrasi serta membuka ruang partisipasi publik adalah dengan mendorong implementasi teknologi dan transformasi digital untuk melahirkan kreatifitas dan inovasi dalam membantu proses penyelesaian masalah prioritas dan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah untuk mengakselerasi terwujudnya kehidupan masyarakat Kalimantan Utara yang Maju, Berubah dan Sejahtera.

Berdasarkan penjabaran visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara, maka tujuan rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara adalah **Meningkatkan Kualitas Implementasi e-government** dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses layanan informasi publik;
2. Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis elektronik;
3. Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral daerah;
4. Meningkatnya keamanan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem elektronik (*e-government*).

Indikator Tujuan dan masing – masing Sasaran beserta Targetnya dapat disajikan dalam tabel 3.3 berikut ini :



Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

| NO | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 |
|---|---|--|-------------|
| 1 | Meningkatkan kualitas implementasi e-Government | Indeks SPBE | 3,2 |
| | 1 Meningkatkan akses layanan Informasi publik | Jumlah desa yang dapat mengakses layanan publik berbasis elektronik | 247 |
| | 2 Meningkatkan layanan pemerintahan berbasis elektronik | Nilai Domain layanan SPBE | 3,3 |
| | 3 Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral daerah | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun Perencanaan pembangunan Daerah | 95 |
| | | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | 95 |
| 4 Meningkatkan keamanan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem elektronik (e-government) | Capaian Skor Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | 100 | |

Sumber : Renstra DKISP 2021 - 2026



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan / sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

a. Dalam merumuskan program dan kegiatan / sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2023 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

- Mempedomani Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026.
- Mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara mendapat tanggung jawab dalam mendukung Misi 2 “Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang ditopang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten / Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja” dengan fokus sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan profesional, efisien, efektif dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja dimana salah satu indikatornya adalah Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kemudian diharapkan juga dapat mendukung Misi 5 “Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan” dengan fokus sasaran meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Utara dimana salah satu Indikatornya adalah cakupan akses dan layanan telekomunikasi.
- Pemanfaatan teknologi digital dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu, diharapkan



akan menciptakan proses pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah, sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

- Pemenuhan amanat Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjamin terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian mendiseminasikan Informasi Kebijakan dan Program serta peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui berbagai media.
 - Ketersediaan informasi yang akurat terkait pertumbuhan potensi sektoral di segala bidang sebagai bahan evaluasi Kebutuhan penyelenggaraan pengamanan informasi berklasifikasi
 - Diterapkan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) untuk menganalisa dan mengevaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi di Pemerintahan. Keamanan informasi pada suatu Pemerintahan merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian utama.
 - Kedinamisan kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informatika yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman serta Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan yang sangat pesat, sehingga memerlukan peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang mendukung kemajuan ekonomi di Kalimantan Utara.
- b. Rencana program dan kegiatan / sub kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 secara garis besar adalah sebagai berikut :
- Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak **5 program**, yang terdiri dari 1 program penunjang yang sifatnya rutin (Kesekretariatan) dan 4 program teknis. Jumlah kegiatan / sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak **11 kegiatan** dan **36 sub kegiatan**, yang terdiri dari 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan penunjang serta 5 kegiatan dan 21 sub kegiatan teknis.
 - Jumlah total Pagu Rancangan Awal RKPD dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan / sub kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 19.053.412.856,68,-**. Namun saat menyusun Rencana Kerja



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Tahun 2023 berdasarkan hasil analisis kebutuhan diperoleh pagu indikatif kebutuhan dalam seluruh program dan kegiatan / sub kegiatan adalah sebesar **Rp. 34.543.050.000,-** yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Utara.

Rincian Rumusan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 (*Excel to pdf*)













BAB V PENUTUP

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Berdasarkan analisa kebutuhan yang dilakukan dalam proses penyusunan, diperoleh nilai indikatif anggaran yang dibutuhkan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 34.543.050.000,-** atau lebih besar dari pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar **Rp. 19.053.412.856,68,-**. Nilai indikatif anggaran ini didapat dengan mempertimbangkan beberapa kondisi yaitu :

- 1) Memperhatikan pelaksanaan anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2022 serta kebutuhan pada program penunjang urusan pemerintahan provinsi pada Tahun 2023, termasuk Belanja Pegawai (kegiatan rutin);
- 2) Rencana target capaian kinerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 terhadap 3 (tiga) urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian; serta
- 3) Usulan program dan kegiatan / sub kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara.

Penyusunan Rencana Anggaran dengan nilai kebutuhan yang melebihi daripada nilai pagu indikatif pada Rancangan RKPD 2023 ini semata-mata untuk memperkuat fungsi dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung dan mengakselerasi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2023, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026 dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026, usulan para pemangku kepentingan baik yang berasal dari Kabupaten / Kota maupun Pokok – Pokok Pikiran DPRD Provinsi yang telah disampaikan dalam



Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 serta berbagai kebijakan umum pembangunan dalam urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu - isu terutama dalam mewujudkan Peningkatkan Kualitas Implementasi *e-government* di Kalimantan Utara.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan juga perhatian terhadap kaidah - kaidah pelaksanaan Rencana Kerja, antara lain :

- 1) Kepala perangkat daerah melakukan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan melaporkan kepada gubernur melalui Bappeda dan Litbang secara periodik sesuai peraturan;
- 2) Renja perangkat daerah menjadi instrumen penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- 3) Renja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

5.3 Rencana tindak lanjut

Dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diperlukan sinergitas semua pihak terkait dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Diharapkan melalui Rencana Kerja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang semakin komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan semakin terfokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.

Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini dibuat dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan konsisten oleh seluruh aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara .

Tanjung Selor, Juli 2022
Kepala Dinas,

ILHAM ZAIN, S.SOS., M.PA
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19670407 199803 1 007